



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO



**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
RENJA PD
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

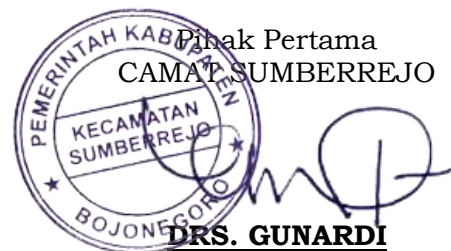
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas Rahmat dan Hidayah-Nya semata, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024 Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan mengacu issue utama, strategi dan prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah ini dapat kami selesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Saat in, kami telah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA – PD) Tahun 2024 sebagai Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2024. Harapan kami Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD) Tahun 2024 ini dapat dipakai acuan Evaluasi pelaksanaan RENJA – Perangkat Daerah tahun lalu dan gambaran pelaksanaan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sumberrejo.

Kami sadar sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD) Tahun 2024 Kecamatan Sumberrejo ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Sumberrejo, 14 Agustus 2023

Pihak Pertama
CAMAT SUMBERREJO



DRS. GUNARDI

Pembina Tk.I

NIP. 19660406 198608 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan..... 3

1.4. Sistematika Penulisan..... 3

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sumberrejo
Tahun lalu dan Capaian Renstra PD 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 17

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 19

2.4. Review terhadap RANWAL RKPD 19

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 28

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA – PD 29

3.3. Program dan Kegiatan PD 30

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 32

BAB V : PENUTUP..... 40

Lampiran :

- SK Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Sumberrejo, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah.

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta 13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumberrejo Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Sumberrejo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sumberrejo dengan pengalokasian anggaran secara selektif dan efisien sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumberrejo dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 adalah menciptakan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan selama Tahun 2024 serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Sumberrejo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Sumberrejo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penyusunan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja mandiri yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberrejo.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap RANWAL RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

4. Melampirkan tabel berikut, Tabel T- C.31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian atas program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari Perangkat Daerah lain, berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dan penelitian lapangan dan pengamanan pelaksana musrenbang Kabupaten (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah .
3. Menyajikan Tabel T-C.32.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sub Bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah mengacu pada:

- Mendukung Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan menteri dalam negeri Nomor 050-308 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini berisikan penjelasan mengenai :

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir, dsb.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi Jumlah program dan jumlah kegiatan, kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- 4) Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Tabel –TC 33

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya etersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan .
- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

Pada bagian ini berisi SK Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolok ukur capaian kinerja Kecamatan Sumberrejo. Mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumberrejo adalah kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka dalam pelaksanaannya setiap program dan kegiatan pembangunan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dengan kegiatan tersebut.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sumberrejo Tahun 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Sumberrejo dalam pelaksanaan Renja 2022 ada Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak terpenuhi karena adanya Kekosongan Jabatan Struktural.

- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Sumberrejo dalam pelaksanaan Renja 2022 ada beberapa Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2022 Perangkat Daerah Kecamatan Sumberrejo tidak ditemukan.

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

- a. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait dengan pengadaan kegiatan yang diselenggarakan untuk kecamatan,
- b. Sering terjadinya beberapa kegiatan diambil alih oleh perangkat daerah terkait pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga pagu

anggaran yang sudah kita rancang di Kecamatan tidak bisa direalisasikan/kembali ke kas daerah

- c. Adanya Kekosongan Jabatan Struktural yang menyebabkan Gaji dan TPP Tidak terserap secara maksimal.

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sumberrejo adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sumberrejo tahun 2018-2024 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat kecamatan Sumberrejo pada umumnya
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sumberrejo berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan Sumberrejo.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

Evaluasi Renja Tahun 2022 terhadap program /kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, Anggaran Renja Kecamatan Sumberrejo, realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023
Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sumberrejo

Lembar : 1

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2023	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
4	01			Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan									
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
			2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan terbayarnya rekening listrik dan telepon	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya anggaran jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			8	Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor	terlaksana lingkungan kantor yang nyaman	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksana kebutuhan ATK	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya kegiatan dan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya alat alat listrik dan instalasi kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sumberrejo

Lembar : 2

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya pegawai yang berwawasan luas dan selalu update berita terbaru	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terpenuhinya pelaksanaan kloordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terlaksannya pelaksanaan kegiatan kecamatan dan pelayanan pada masyarakat	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			20	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	terlaksananya kegiatan dan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			22	Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum	terlaksananya rapat forpimda	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
4	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksana kantor yang memadai	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kelengkapan Kendaraan Dinas	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			28	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terwujudnya Kenyamanan perkantoran	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
4	01	03	Program peningkatan disiplin aparatur										
			5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian hari-hari tertentu	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
4	01	07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
			01	Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			02	Layanan Administrasi Keuangan	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			3		Penyusunan Program dan Laporan	Jumlah Jenis Program dan Laporan yang disusun sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			4		Pelayanan Umum	Jumlah Jenis Layanan Publik yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			5		Layanan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Pemerintahan yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			6		Layanan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			7		Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			8		Layanan Administrasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan penunjang daerah	100%	-	100%	95%	95%	100%	100%	100%
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	43 dokumen	-	13 dokumen	12,5 dokumen	96,15%	30 dokumen	42,5 dokumen	99%
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen	100%	8 dokumen	13 dokumen	100%
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 dokumen	100%
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 dokumen	100%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 laporan	-	4 laporan	4 laporan	100%	15 laporan	19 laporan	100%
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	-	2 laporan	2 laporan	100%	3 laporan	5 laporan	100%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	49 laporan	-	17 laporan	16 laporan	94,12%	32 laporan	48 laporan	98%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 orang/ bulan	-	266 orang/ bulan	252 orang/ bulan	94,74%	266 orang/ bulan	518 orang/ bulan	97%
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18 dokumen	-	6 dokumen	6 dokumen	100%	12 dokumen	18 dokumen	100%
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 laporan	-	6 laporan	6 laporan	100%	18 laporan	24 laporan	100%
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang lengkap administrasi	20 unit	-	10 unit	10 unit	100%	10 unit	20 unit	100%
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	-	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	4 laporan	100%
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	8 laporan	-	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	8 laporan	100%
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	8 dokumen	100%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	9 laporan	-	5 laporan	5 laporan	100%	4 laporan	9 laporan	100%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	100%
7	01	01	00	02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	-	1 paket	1 paket	100%	-	1 paket	100%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	-	4 paket	4 paket	100%	4 paket	8 paket	100%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	-	3 paket	3 paket	100%	2 paket	5 paket	100%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	-	3 laporan	3 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	100%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 jenis	-	1 jenis	1 jenis	100%	-	1 jenis	100%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	-	1 unit	100%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	15 jenis	-	6 jenis	6 jenis	100%	9 jenis	15 jenis	100%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	100%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	6 laporan	18 laporan	100%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	12 jenis	-	5 Jenis	5 Jenis	100%	7 jenis	12 jenis	100%
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 unit	-	12 unit	13 unit	100%	12 unit	24 unit	100%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	-	100%	99,50%	99,50%	100%	100%	100%
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan tsb dilaksanakan	24 kali	-	12 kali	11 kali	95,84%	12 kali	23 kali	96%
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17 laporan	-	5 laporan	5 laporan	100%	12 laporan	17 laporan	100%
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	3 kali	-	1 kali	1 kali	100%	2 kali	3 kali	100%
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	100%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	19 kali	-	6 kali	6 kali	100%	13 kali	19 kali	100%
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	1 dokumen	100%
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	51 laporan	-	38 laporan	38 laporan	100%	13 laporan	51 laporan	100%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	-	3 kali	3 kali	100%	12 kali	15 kali	100%
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyaraka tan	-	5 Lembaga Kemasyaraka tan	5 Lembaga Kemasyaraka tan	100%	7 Lembaga Kemasyaraka tan	12 Lembaga Kemasyaraka tan	100%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	24 laporan	100%
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	-	100%	99,79%	99,79	100%	99,89%	99,89%
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenterama dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi yang dilakukan	24 kali	-	12 kali	12 kali	100%	12 kali	24 kali	100%
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	100%
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang dilakukan	24 kali	-	12 kali	12 kali	100%	12 kali	24 kali	100%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	100%
7	01	06			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	100%	-	100%	98%	98%	100%	99%	99%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	21 kali	-	11 kali	10,75 kali	97,73%	10 kali	20,75 kali	99%
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100%	3 dokumen	7 dokumen	100%
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 dokumen	-	5 dokumen	4,75 dokumen	95%	5 dokumen	9,75 dokumen	98%
7	01	06	2.02	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	-	3 dokumen	100%
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	100%
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11 laporan	-	4 laporan	4 laporan	100%	7 laporan	11 laporan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan pada Perangkat Daerah Kecamatan Sumberrejo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, telah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro serta Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro yaitu untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melakukan perencanaan pembangunan yang berbasis kemasyarakatan, sekaligus melakukan pelaporan pembangunan, dalam melaksanakan tugasnya, bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Sumberrejo Tahun 2022, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sumberrejo. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sumberrejo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target SPM/IKU/ IKK atau Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi			Analisis
			Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai Sinergitas kinerja kecamatan		85,7	80,0	82	-	-	79,225	81,75	82	-	-	
2	Nilai kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan umum		4.56	4.62	4.68	-	-	4.85	4.93	4,95	-	-	
3	Nilai kinerja aspek pelayanan terpadu		7.60	7.70	7.80	-	-	8.08	8.22	8,3	-	-	
4	Nila kinerja aspek pelaksanaan tugas delegatif		7.60	7.70	7.80	-	-	8.08	8.22	8,3	-	-	
5	Nilai Kinerja penyelenggaraan tugas lainnya		3.80	3.90	3.90	-	-	4.04	4.11	4,15	-	-	
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		-	3,22	3,32	-	-	-	3,32	3,38	-	-	
7	Nilai kinerja aspek penyelenggaraan tugas atributif		27.36	27.72	28,08	-	-	29.07	37.83	37,84	-	-	
8	Nilai kinerja aspek pengelolaan anggran		6.08	6.16	6.24	-	-	6.46	6.58	6,56	-	-	
9	Nilai kinerja aspek inovasi/kreatifitas kecamatan		20.52	20.79	21.06	-	-	21.80	22.20	22,14	-	-	
10	Indeks Kepuasan Masyarakat		-	-	-	3,38	3,40	-	-	-	3,38	3,40	
11	Rata-rata layanan kecamatan yang dapat diselesaikan sesuai SOP		-	-	-	89,21	90,21	-	-	-	89,21	90,21	
12	Persentase Layanan Pemerintahan yang dapat diselesaikan sesuai SOP		-	-	-	87,58	88,58	-	-	-	87,58	88,58	
13	Persentase Layanan Kesejahteraan Masyarakat yang dapat diselesaikan sesuai SOP		-	-	-	93,58	94,58	-	-	-	93,58	94,58	
14	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat yang dapat diselesaikan sesuai SOP		-	-	-	90,46	91,46	-	-	-	90,46	91,46	
15	Persentase Layanan Ketrentaman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sesuai SOP		-	-	-	85,22	86,22	-	-	-	85,22	86,22	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Sumberrejo sebagai pelaksana pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur Peraturan Bupati No. 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Seperti termuat dalam Renstra Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023, isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Sumberrejo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas masih dijumpai adanya beberapa isu-isu kerja yang menjadi hambatan dan tantangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Kec. Sumberrejo dengan instansi terkait.
2. Belum optimalnya administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
3. Masih terdapat beberapa program kerja yang tidak berjalan sesuai perencanaan.
4. Pengelolaan realisasi APBD tidak sesuai rencana.
5. Penerapan sistem pengawasan melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah belum maksimal.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberrejo serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro. Sebagai

dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan RKPD Kabupaten Bojonegoro disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses Button-up dan Top-down). Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Sumberrejo diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

Review tersebut digambarkan pada tabel berikut :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelaksanaan kegiatan urusan penunjang pemerintahan daerah	100%	4,490,093,962	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelaksanaan kegiatan urusan penunjang pemerintahan daerah	100%	4,490,093,962	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah dokumen yang disusun	9 dokumen	11,675,600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah dokumen yang disusun	9 dokumen	11,675,600	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	3,902,600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	3,902,600	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	350,300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	350,300	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	350,300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	350,300	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	350,300	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	350,300	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3,554,200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3,554,200	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	2,817,600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	2,817,600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah laporan keuangan yang disusun	14 laporan	4,090,328,877	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah laporan keuangan yang disusun	14 laporan	4,090,328,877	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sumberrejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	3,986,288,877	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sumberrejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	3,986,288,877	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 dokumen	104,040,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 dokumen	104,040,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah Barang Milik Daerah yang lengkap administrasi	12 unit	7,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah Barang Milik Daerah yang lengkap administrasi	12 unit	7,000,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	4 laporan	10,025,800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	4 laporan	10,025,800	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Sumberrejo	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	7,570,600	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Sumberrejo	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	7,570,600	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	26 Dokumen	2,455,200	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	26 Dokumen	2,455,200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	13 laporan	83,165,900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	13 laporan	83,165,900	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sumberrejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,534,800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sumberrejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,534,800	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Sumberrejo	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	2 Paket	22,573,500	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Sumberrejo	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	2 Paket	22,573,500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sumberrejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	10,836,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sumberrejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	10,836,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Sumberrejo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	3,690,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Sumberrejo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	3,690,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	43,531,600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	43,531,600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	3 Jenis	107,871,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	3 Jenis	107,871,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sumberrejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	107,871,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sumberrejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	107,871,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	5 jenis	113,623,913	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	5 jenis	113,623,913	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	45,548,713	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	45,548,713	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	68,075,200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	68,075,200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	4 jenis	66,402,872	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	4 jenis	66,402,872	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sumberrejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	32,500,872	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sumberrejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	32,500,872	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sumberrejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	13,810,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sumberrejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	13,810,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Sumberrejo	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 unit	20,092,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Sumberrejo	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 unit	20,092,000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Sumberrejo	Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	695,854,400	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Sumberrejo	Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	695,854,400	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sumberrejo	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	4 kali	1,779,400	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sumberrejo	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	4 kali	1,779,400	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1,779,400	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1,779,400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Sumberrejo	Jumlah urusan pemerintahan tsb dilaksanakan	48 kali	2,565,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Sumberrejo	Jumlah urusan pemerintahan tsb dilaksanakan	48 kali	2,565,000	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	1,065,000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	1,065,000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1,500,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1,500,000	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Sumberrejo	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	2 Kali	430,000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Sumberrejo	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	2 Kali	430,000	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	430,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	430,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Sumberrejo	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	2 Kali	691,080,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Sumberrejo	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	2 Kali	691,080,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	691,080,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	691,080,000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Sumberrejo	Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	100%	23,918,800	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Sumberrejo	Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	100%	23,918,800	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Sumberrejo	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	3 Kali	23,918,800	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Sumberrejo	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	3 Kali	23,918,800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sumberrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	12,165,200	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sumberrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	12,165,200	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 dokumen	3,375,000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 dokumen	3,375,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	8,378,600	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	8,378,600	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Sumberrejo	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	7,150,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Sumberrejo	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	7,150,000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah koordinasi yang dilakukan	4 Kali	7,150,000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Sumberrejo	Jumlah koordinasi yang dilakukan	4 Kali	7,150,000	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Sumberrejo	Jumlah koordinasi yang dilakukan	4 Kali	7,150,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Sumberrejo	Jumlah koordinasi yang dilakukan	4 Kali	7,150,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Sumberrejo	Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	100%	12,762,700	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Sumberrejo	Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	100%	12,762,700	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sumberrejo	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	47 Kali	12,762,700	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sumberrejo	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	47 Kali	12,762,700	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	2,679,500	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	2,679,500	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	2,730,800	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	2,730,800	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dokumen	4,424,900	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dokumen	4,424,900	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen	699,200	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Sumberrejo	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen	699,200	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	26 Laporan	2,228,300	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Sumberrejo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	26 Laporan	2,228,300	
JUMLAH					5,229,779,862	JUMLAH					5,229,779,862

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- 1) Bahwa Usulan Program/ Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.
- 2) Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- 3) Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sumberrejo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		N I H I L			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2024 mengangkat tema ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,”*** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024, menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu:

- 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- 3) Penguatan Daya Saing Usaha;
- 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”***. Untuk mewujudkan Visi dirumuskan melalui ***9 (Sembilan) Misi pembangunan*** sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;

7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional Tahun 2024, Rencana Kerja Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 tidak mendukung secara langsung prioritas-prioritas Pembangunan Nasional, namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, maka dukungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2024 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rencangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh Kecamatan Sumberrejo maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sehingga diharapkan program kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah Kecamatan Sumberrejo dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Sumberrejo memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Sumberrejo untuk jangka waktu 5 tahun kedepan. Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas Rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sumberrejo Tahun 2024-2026.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Sumberrejo yang ingin dicapai selama kurun waktu jangka menengah tiga tahun sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sumberrejo
 Kabupaten Bojonegoro

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Indikator Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	3,38
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Rata-rata layanan kecamatan yang dapat diselesaikan sesuai SOP	89,21
			a. Persentase Layanan urusan Pemerintahan Kecamatan yang dapat diselesaikan sesuai SOP	87,58
			b. Persentase Layanan urusan Kesra Kecamatan yang dapat diselesaikan sesuai SOP	93,59
			c. Persentase Layanan urusan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan yang dapat diselesaikan sesuai SOP	90,46
			d. Persentase Layanan urusan Trantib dan Linmas Kecamatan yang dapat diselesaikan sesuai SOP	85,22

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kecamatan Sumberrejo merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kecamatan Sumberrejo yang mendukung Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Sumberrejo sebagai berikut :

- 1) Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : 1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan : 1) Pengadaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
2) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum
3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
- 3) Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan : 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 4) Program: Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan : 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2) Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Perda Dan Perkada
- 5) Program: Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan : 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Sumberrejo diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Bojonegoro terpilih nantinya. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Sumberrejo merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih nantinya.

2. Pencapaian SDGs

SDGs atau *Sustainable Development Goals* adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan global sebelumnya yaitu MDGs atau Millennium Development Goals yang memiliki 8 tujuan yang ingin dicapai masyarakat global, SDGs memiliki 17 tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dunia. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Sumberrejo diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs itudalam lingkup Kecamatan.

3. Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Sumberrejo. Program dan kegitan yang dirancang

pada tahun anggaran 2024 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

4. Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadapnya penyimpang dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Sumberrejo diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Sumberrejo sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Bojonegoro. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti home industri pengolahan makanan, perajin batik, peternakan, perikanan, pertanian dan obyek-obyek wisata. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Sumberrejo melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

6. Pengembangan daerah terisolir

Dalam rangka mewujudkan capaian SDGs Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro dalam RPJMD juga memprioritaskan pembangunan daerah terpencil dan terisolir. Oleh karena itu Kecamatan yang merupakan

Kepanjangannya dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentunya akan berusaha semaksimalnya untuk mendukung dan melaksanakan Program Pembangunan Daerah Terpencil dengan cara melakukan inventarisasi wilayah, mengusulkan dan memasukkan dalam Musrenbang Kabupaten, memberikan pendampingan di wilayah-wilayah terpencil dalam rangka pembukaan akses baik transportasi, informasi sehingga dalam kurun waktu singkat tidak ada lagi daerah tertinggal/ terpencil dan pembangunan dapat dirasakan merata dan berkeadilan.

7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja atau indikator kinerja utama (IKU) atau ukuran kinerja terpilih (key performance indicators, KPI) adalah matrik finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah dan didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD dan Indikator Kinerja Utama.

b) **Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.**

- ❖ Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.
Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Sumberrejo Tahun 2024 adalah 5 Program dengan 15 Kegiatan.
- ❖ Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.
Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Sumberrejo sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Sumberrejo dan melingkupi semua Desa
- ❖ Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaannya, yaitu Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil dan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

c) **Ketidaksesuaian Rumusan Program dan Kegiatan dengan Rancangan Awal RKPD**

Tidak terdapat ketidaksesuaian Rumusan Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

d) **Tabel Rencana Program dan kegiatan**

Tabel Rencana Program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sumberrejo

KODE REK					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting / Sumber dana APBD Kab	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan penunjang pemerintahan daerah	Kec. Sumberrejo	100%	4,490,093,962	DBH	-	100%	4,112,231,446
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Kec. Sumberrejo	9 dokumen	11,675,600	DBH	-	9 dokumen	11,209,380
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sumberrejo	5 dokumen	3,902,600	DBH	-	5 dokumen	3,594,990
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Sumberrejo	1 dokumen	350,300	DBH	-	1 dokumen	372,645
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Sumberrejo	1 dokumen	350,300	DBH	-	1 dokumen	372,645
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Sumberrejo	1 dokumen	350,300	DBH	-	1 dokumen	372,645

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Sumberrejo	1 dokumen	350,300	DBH	-	1 dokumen	372,645
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sumberrejo	1 Laporan	3,554,200	DBH	-	1 Laporan	3,142,965
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sumberrejo	7 Laporan	2,817,600	DBH	-	7 Laporan	2,980,845
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Kec. Sumberrejo	14 laporan	4,090,328,877	DBH, DAU	-	14 laporan	3,700,216,396
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sumberrejo	26 Orang/Bulan	3,986,288,877	DAU	-	26 Orang/Bulan	3,588,276,106
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sumberrejo	14 dokumen	104,040,000	DBH	-	14 dokumen	111,940,290
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang lengkap administrasi	Kec. Sumberrejo	12 unit	7,000,000	DBH	-	12 unit	3,780,000
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sumberrejo	12 Laporan	7,000,000	DBH	-	12 Laporan	3,780,000

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Kec. Sumberrejo	4 laporan	10,025,800	DBH	-	4 laporan	3,052,403
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Sumberrejo	1 unit	7,570,600	DBH	-	1 unit	1,050,000
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Sumberrejo	26 Dokumen	2,455,200	DBH	-	26 Dokumen	2,002,403
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	Kec. Sumberrejo	13 laporan	83,165,900	DBH	-	13 laporan	105,516,928
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Sumberrejo	5 Paket	2,534,800	DBH	-	5 Paket	1,228,710
7	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Sumberrejo	2 Paket	22,573,500	DBH	-	2 Paket	27,351,240
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Sumberrejo	4 Paket	10,836,000	DBH	-	4 Paket	14,976,833
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Sumberrejo	5 Paket	3,690,000	DBH	-	5 Paket	3,675,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sumberrejo	9 Laporan	43,531,600	DBH	-	9 Laporan	58,285,145

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Kec. Sumberrejo	3 Jenis	107,871,000	DBH	-	3 Jenis	109,061,295
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Sumberrejo	12 unit	107,871,000	DBH	-	12 unit	109,061,295
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Kec. Sumberrejo	5 jenis	113,623,913	DBH	-	5 jenis	121,898,211
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Sumberrejo	36 Laporan	45,548,713	DBH	-	36 Laporan	49,938,292
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Sumberrejo	12 Laporan	68,075,200	DBH	-	12 Laporan	71,959,919
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Sumberrejo	4 jenis	66,402,872	DBH	-	4 jenis	57,496,833
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Sumberrejo	5 unit	32,500,872	DBH	-	5 unit	28,947,333
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Sumberrejo	15 unit	13,810,000	DBH	-	15 unit	7,549,500
7	01	01	2.10	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Sumberrejo	2 unit	20,092,000	DBH	-	2 unit	21,000,000

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Kec. Sumberrejo	100%	695,854,400		-	100%	737,262,120
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kec. Sumberrejo	4 kali	1,779,400	DBH	-	4 kali	3,443,265
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sumberrejo	1 Dokumen	1,779,400	DBH	-	1 Dokumen	3,443,265
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan tsb dilaksanakan	Kec. Sumberrejo	48 kali	2,565,000	DBH	-	48 kali	3,533,355
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sumberrejo	3 Laporan	1,065,000	DBH	-	3 Laporan	1,643,355
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sumberrejo	2 Laporan	1,500,000	DBH	-	2 Laporan	1,890,000
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	Kec. Sumberrejo	2 Kali	430,000	DBH		2 Kali	451,500
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Sumberrejo	1 Dokumen	430,000	DBH		1 Dokumen	451,500

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	Kec. Sumberrejo	2 Kali	691,080,000	DBH	-	2 Kali	729,834,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sumberrejo	4 Laporan	691,080,000	DBH	-	4 Laporan	729,834,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	Kec. Sumberrejo	100%	23,918,800		-	1	23,539,740
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kec. Sumberrejo	3 Kali	23,918,800	DBH	-	3 Kali	23,539,740
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sumberrejo	5 Lembaga Kemasyarakatan	12,165,200	DBH	-	5 Lembaga Kemasyarakatan	11,198,460
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Sumberrejo	1 dokumen	3,375,000	DBH	-	1 dokumen	3,543,750
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sumberrejo	5 Laporan	8,378,600	DBH	-	5 Laporan	8,797,530

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	Kec. Sumberrejo	100%	7,150,000	DBH	-	1	7,507,500
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang dilakukan	Kec. Sumberrejo	4 Kali	7,150,000	DBH	-	4 Kali	7,507,500
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi yang dilakukan	Kec. Sumberrejo	4 Kali	7,150,000	DBH	-	4 Kali	7,507,500
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	Kec. Sumberrejo	100%	12,762,700		-	1	13,400,835
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	Kec. Sumberrejo	47 Kali	12,762,700	DBH	-	47 Kali	13,400,835
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Sumberrejo	3 Dokumen	2,679,500	DBH	-	3 Dokumen	2,835,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sumberrejo	3 Dokumen	2,730,800	DBH	-	3 Dokumen	2,844,555

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Sumberrejo	9 Dokumen	4,424,900	DBH	-	9 Dokumen	4,646,250
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Sumberrejo	3 Dokumen	699,200	DBH	-	3 Dokumen	735,000
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Sumberrejo	26 Laporan	2,228,300	DBH	-	26 Laporan	2,340,030
J U M L A H									5,229,779,862				4,893,941,641

BAB V **PENUTUP**

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Sumberrejo Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberrejo Tahun 2018-2024 yang mengacu pada visi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2024 adalah **“Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing”**. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Sumberrejo yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Sumberrejo. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Sumberrejo didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Sumberrejo berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumberrejo Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
 - b. Kecamatan Sumberrejo berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sumberrejo Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Sumberrejo Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Sumberrejo Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.
- 3) Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumberrejo selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Sumberrejo. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Sumberrejo Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/ pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Sumberrejo ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumberrejo dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bojonegoro.

Sumberrejo, 14 Agustus 2023


CAMA~~T~~ SUMBERREJO

DRS. GUNARDI
Pembina Tk.I
NIP. 19660406 198608 1 002